EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

REFKI MAULANA
NPP. 33.0184
Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email : refkimaula12@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si
Email : murtirjeddawi15@gmail.com

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): *The problem of neglected children in Pekanbaru City remains a complex social issue, marked by the continued presence of children living on the streets and the limited ability to meet their basic needs. Although the government has established policies to address this issue through social rehabilitation programs, their implementation has not been fully optimized.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of policies for dealing with neglected children in Pekanbaru City, identify supporting and inhibiting factors, and examine government efforts to improve the effectiveness of these policies.* ***Method:*** *This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Research informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques, involving Social Services officials, shelter managers, neglected children, and the community. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the Miles and Huberman interactive model.* ***Result:*** *The research results indicate that the policy for handling neglected children in Pekanbaru City has been quite effective, particularly in providing basic services and guidance in shelters. However, its effectiveness is not optimal due to ongoing challenges such as limited human resources, inadequate facilities, and uneven outreach. Furthermore, the frequent movement of neglected children also presents a challenge in data collection.* ***Conclusion:*** *In conclusion, this policy is quite effective but needs to be improved through enhanced outreach, improved facilities and infrastructure, and the development of sustainable empowerment programs to maximize its results.*

Keywords: *Policy Effectiveness; Abandoned Children; Social Rehabilitation*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Permasalahan anak terlantar di Kota Pekanbaru masih menjadi isu sosial yang kompleks, ditandai dengan masih ditemukannya anak-anak yang hidup di jalanan serta keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan penanganan melalui program rehabilitasi sosial, implementasinya belum sepenuhnya optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yang melibatkan aparatur Dinas Sosial, pengelola shelter, anak terlantar, serta masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, terutama dalam pemberian layanan kebutuhan dasar dan pembinaan di shelter. Namun, efektivitasnya belum optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, sosialisasi yang belum merata, serta mobilitas anak terlantar yang menyulitkan pendataan. **Kesimpulan:** Kebijakan penanganan anak terlantar cukup efektif tetapi perlu perbaikan. Guna memaksimalkan hasil, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi, memperbaiki sarana dan prasarana, serta mengembangkan program pemberdayaan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan; Anak Terlantar; Rehabilitasi Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Republik Indonesia terus dihadapkan pada hambatan sosial yang berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan tidak sekadar dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terhindar dari berbagai bentuk kerentanan sosial, salah satunya adalah keberadaan anak terlantar yang dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Istilah anak terlantar tidak semata-mata mengarah pada kondisi kehilangan orang tua kandung, melainkan mencakup situasi di mana hak-hak dasar anak atas pengasuhan, perkembangan yang wajar, dan pendidikan belum terjamin karena kelalaian maupun ketidakmampuan pihak yang bertanggung jawab (Hadi Khaz et al., 2023).

Setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyediakan fasilitas perlindungan anak, sementara masyarakat memegang peran penting melalui keterlibatan langsung dalam gotong royong untuk memastikan hak anak dilindungi secara maksimal (Jannah et al., 2022). Di Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi landasan hukum yang mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar. Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan peran aktifnya dengan melaksanakan program bantuan sosial sebagai upaya memberantas kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka anak terlantar (Sajow et al., 2019).

Meskipun demikian, data Dinas Sosial tahun 2021 mencatat terdapat 266.538 jiwa PPKS, di mana pemenuhan bantuan secara keseluruhan belum mencapai 100% pada beberapa kategori. Penanganan PPKS, termasuk anak terlantar, menuntut pendekatan yang komprehensif dari pemerintah daerah, sebagaimana diungkap Handayani & Ma'aruf (2019) bahwa penanggulangan PMKS memerlukan sinergi antara kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat agar program kesejahteraan sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Angka kemiskinan juga terus meningkat dari 30.400 jiwa (2020) menjadi 38.160 jiwa (2024), yang berbanding lurus dengan fluktuasi jumlah anak terlantar di jalanan. Secara normatif, pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar selama minimal tujuh hari telah diatur dalam Permensos No. 9 Tahun 2018. Namun, dalam implementasinya di lapangan, kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan sumber daya, sulitnya proses rujukan akibat ketiadaan dokumen kependudukan anak, dan minimnya penjangkauan yang berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Permasalahan mengenai implementasi kebijakan dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar masih menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial pemerintah daerah. Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan intervensi tidak hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui upaya perlindungan, penguatan kapasitas keluarga, serta dukungan lingkungan sosial yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, penanganan anak terlantar masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan validitas data penerima layanan, keterbatasan koordinasi antaraktor, serta keberlanjutan proses reintegrasi anak ke dalam keluarga dan masyarakat.

Permasalahan pertama berkaitan dengan pendekatan implementasi kebijakan yang masih dominan berorientasi pada aspek administratif dan kelembagaan. Sejumlah penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan penanganan anak terlantar lebih banyak menyoroti faktor internal organisasi pemerintah seperti standar operasional prosedur, sumber daya aparatur, komunikasi kebijakan, serta disposisi pelaksana. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dan keluarga sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan sosial.

Studi yang dilakukan oleh Rohma dkk. (2025), Natika & Rinjani (2022), serta Afandi dkk. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, efektivitas koordinasi, serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan program pada tingkat daerah. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan sosial, tetapi kajian mengenai bagaimana kebijakan tersebut mampu membangun kemandirian keluarga dan komunitas masih relatif terbatas.

Permasalahan berikutnya adalah kecenderungan penanganan anak terlantar yang masih menggunakan pendekatan charity atau bantuan langsung dibandingkan pendekatan empowerment atau pemberdayaan. Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka pendek memang penting sebagai bentuk perlindungan sosial, namun belum selalu mampu menyelesaikan akar persoalan penelantaran anak seperti lemahnya kapasitas ekonomi keluarga, rendahnya pengawasan keluarga, dan keterbatasan dukungan lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sosial yang menekankan bahwa pembangunan masyarakat tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi perlu meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri (Suharto, 2014).

Kondisi tersebut terlihat pada fenomena anak terlantar di kawasan perkotaan seperti Kota Pekanbaru yang memiliki dinamika mobilitas sosial tinggi. Anak terlantar sering berpindah lokasi sehingga proses pendataan, pemantauan, serta reintegrasi dengan keluarga mengalami hambatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya bergantung pada kapasitas Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga membutuhkan partisipasi keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), pendekatan collaborative governance menempatkan pemerintah tidak sebagai satu-satunya aktor, tetapi sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik.

Selain itu, perkembangan kawasan perkotaan yang pesat menyebabkan perubahan pola hubungan sosial masyarakat. Modernisasi dan urbanisasi dapat memperlemah fungsi kontrol sosial berbasis komunitas sehingga keluarga yang mengalami masalah sosial semakin sulit mendapatkan dukungan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan menjadi penting karena mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menangani persoalan sosial secara berkelanjutan (Midgley, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) bahwa kajian terdahulu lebih banyak menilai implementasi kebijakan berdasarkan keberhasilan administrasi pemerintah, sementara aspek pemberdayaan keluarga dan komunitas sebagai strategi keberlanjutan rehabilitasi sosial anak terlantar masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi sosial anak terlantar secara lebih komprehensif, tidak hanya melihat capaian program dari sisi birokrasi pemerintah, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong

pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam memutus rantai penelantaran anak di wilayah perkotaan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kelompok rentan khususnya anak terlantar. Kajian terhadap penelitian sebelumnya diperlukan untuk melihat perkembangan studi yang telah dilakukan, menemukan keterbatasan penelitian terdahulu, serta menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian Rohma dkk. (2025) mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi sosial anak terlantar menemukan bahwa pelaksanaan program penanganan anak terlantar masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi antarorganisasi, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, serta belum optimalnya mekanisme pendataan penerima layanan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Selanjutnya, penelitian Natika & Rinjani (2022) tentang implementasi kebijakan pelayanan sosial terhadap anak terlantar menjelaskan bahwa faktor komunikasi kebijakan, disposisi pelaksana, serta ketersediaan fasilitas menjadi aspek penting dalam mencapai keberhasilan program. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses internal birokrasi pemerintah dan belum mengkaji secara mendalam keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan sosial anak.

Penelitian Afandi dkk. (2024) terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar menunjukkan bahwa program pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas pelayanan, kurangnya tenaga pendamping sosial, dan lemahnya proses reintegrasi anak setelah memperoleh layanan rehabilitasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi sosial tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sementara, tetapi membutuhkan strategi penguatan kapasitas keluarga agar anak dapat kembali memperoleh lingkungan sosial yang mendukung.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, penelitian Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Konsep ini banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik karena mampu menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh organisasi pemerintah. Namun, pendekatan tersebut lebih menekankan sisi organisasi sehingga perlu dikembangkan dengan melihat aspek kolaborasi dan pemberdayaan sosial masyarakat.

Penelitian Ansell & Gash (2008) melalui kajian tentang collaborative governance menemukan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, bukan hanya pemerintah. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan kolaboratif penting karena persoalan anak terlantar

tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, penelitian Suharto (2014) mengenai pemberdayaan sosial menjelaskan bahwa intervensi sosial yang efektif tidak berhenti pada pemberian bantuan (charity), tetapi harus diarahkan pada peningkatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Pendekatan pemberdayaan menjadi penting dalam rehabilitasi sosial anak terlantar karena akar masalah sering berkaitan dengan kemiskinan, lemahnya fungsi keluarga, serta keterbatasan akses sosial ekonomi.

Penelitian Midgley (2014) tentang pembangunan sosial juga menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek perlindungan, pengembangan kapasitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial anak terlantar perlu diarahkan tidak hanya pada penyelamatan anak dari kondisi rentan, tetapi juga membangun sistem sosial yang mampu mencegah terjadinya penelantaran kembali.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan dari sisi pemerintah sebagai pelaksana, seperti sumber daya birokrasi, prosedur pelayanan, dan kapasitas organisasi. Sementara itu, kajian yang melihat bagaimana kebijakan rehabilitasi sosial mampu mendorong pemberdayaan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari solusi jangka panjang masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi sosial anak terlantar secara lebih komprehensif, yaitu tidak hanya menilai keberhasilan program dari aspek administratif, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun kemandirian keluarga, memperkuat peran masyarakat, serta memutus rantai penelantaran anak di kawasan perkotaan.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah membahas pembinaan, pelayanan, dan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan maupun anak terlantar. Penelitian Rohma dkk. (2025) lebih menitikberatkan pada peran negara dalam pembinaan anak terlantar dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dimana faktor sumber daya ditemukan sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, penelitian Cahyadhi dkk. (2021) lebih berfokus pada aspek psikologis anak jalanan, khususnya rendahnya kesadaran dan motivasi anak dalam mengikuti program pelayanan sosial.

Berbeda dengan penelitian Adoi dkk. (2025) yang menekankan aspek regulasi daerah dan kearifan lokal dalam pelayanan pembinaan anak terlantar, serta penelitian Natika & Rinjani (2022) yang lebih melihat faktor komunikasi, struktur birokrasi, dan ketersediaan SOP dalam implementasi kebijakan, penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan program dari sisi internal organisasi pemerintah. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi sosial anak

terlantar mampu menciptakan proses pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Muhamad Nur Afandi dkk. (2024) yang mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan waktu rehabilitasi dan belum optimalnya sosialisasi keluarga menunjukkan bahwa intervensi sosial masih cenderung bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengembangkan analisis yang melihat rehabilitasi sosial bukan hanya sebagai proses pelayanan, tetapi sebagai strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas keluarga dan lingkungan sosial anak.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikombinasikan dengan perspektif pemberdayaan sosial. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dominan menggunakan pendekatan implementasi birokrasi seperti Edward III (1980) maupun Van Meter dan Van Horn (1975), penelitian ini melihat keberhasilan kebijakan melalui keterhubungan antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial anak terlantar. Pendekatan ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), bahwa penyelesaian masalah publik membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, bukan hanya pemerintah sebagai pelaksana utama.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus lokasi dan objek kajian, yaitu implementasi kebijakan rehabilitasi sosial anak terlantar di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik mobilitas sosial tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan, pendampingan, dan reintegrasi sosial anak menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah non-perkotaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian pemerintahan terapan, khususnya mengenai efektivitas implementasi kebijakan sosial daerah. Penelitian ini tidak hanya mengukur keberhasilan program berdasarkan aspek administratif, tetapi juga melihat sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan perubahan sosial melalui penguatan keluarga dan partisipasi masyarakat dalam memutus rantai penelantaran anak.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan anak terlantar di Kota Pekanbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara kontekstual dengan mendeskripsikan kondisi riil di lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara umum, melainkan menganalisis secara mendalam mengenai proses, dinamika, dan efektivitas kebijakan penanggulangan anak terlantar di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan

menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu mengurai kompleksitas hambatan yang dialami di lapangan secara mendalam, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas yang belum memadai, sosialisasi yang belum merata, hingga kendala tingginya mobilitas anak terlantar yang menyulitkan proses pendataan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif-deskriptif dinilai paling tepat untuk menangkap fenomena riil di lapangan yang tidak dapat dijelaskan secara utuh jika hanya bertumpu pada data numerik atau kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki kriteria relevansi, pengetahuan mendalam, serta keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai informan kunci (*key informant*) karena memegang otoritas kebijakan tertinggi, regulasi, serta pengambil keputusan utama terkait pemberdayaan dan penanggulangan anak terlantar di daerah. Selain itu, informan pelaksana dan penerima manfaat lainnya melibatkan Kepala Bidang/Departemen Rehabilitasi Sosial selaku penanggung jawab teknis program, 1 orang Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial, 1 orang Kepala Shelter/UPT, 5 orang anak terlantar sebagai subjek utama sasaran program, serta 6 orang masyarakat (3 orang yang memiliki anak terlantar dan 3 orang yang anaknya tidak terlantar). Kombinasi seluruh informan ini dipilih secara sengaja untuk menghasilkan gambaran informasi yang utuh dan berimbang dari sudut pandang pembuat kebijakan (*regulator*), pelaksana lapangan (*fasilitator*), hingga kelompok masyarakat serta anak terlantar itu sendiri selaku penerima manfaat.

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan kredibilitas hasil studi. Kredibilitas dan keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada para informan melalui berbagai metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara semi terstruktur (antara pihak Dinas Sosial, kepala shelter, anak terlantar, dan masyarakat), hasil observasi non-partisipan secara langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen laporan resmi maupun regulasi kebijakan yang berlaku. Melalui penggabungan berbagai pendekatan pengumpulan data tersebut, peneliti dapat memperluas pemahaman serta menghasilkan perspektif yang lebih superior dan andal mengenai fenomena di lapangan guna menghindari bias subjektif peneliti.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengikuti model analisis kualitatif yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data (penyajian data), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, data mentah hasil wawancara semi terstruktur disaring, dikelompokkan, dirangkum, dan difokuskan pada poin-poin utama yang relevan dengan efektivitas penanggulangan anak terlantar. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan terstruktur dalam bentuk display data agar benang merah fenomena mudah dipahami. Hasil analisis tersebut kemudian dikaji secara mendalam menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Budiani (2007) yang membedah empat dimensi utama: akurasi arah program (ketepatan target sasaran),

sosialisasi program (penyampaian informasi dan media yang digunakan), pencapaian tujuan program (kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan), serta monitoring dan pemantauan program (evaluasi terhadap permasalahan yang timbul di lapangan).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah perkotaan strategis namun menghadapi tantangan problema sosial berupa dinamika peningkatan jumlah penduduk miskin serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan secara intensif pada tanggal 6 – 24 Januari 2026, yang mencakup pelaksanaan wawancara semi terstruktur bersama jajaran dinas, kepala shelter, masyarakat, dan anak terlantar, hingga pengumpulan dokumen arsip pendukung kebijakan kesejahteraan sosial daerah. Dengan rentang waktu pelaksanaan tersebut, penelitian ini mampu menyajikan potret yang aktual dan kontekstual mengenai efektivitas program pelayanan rehabilitasi sosial serta program penanggulangan anak terlantar yang tengah berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru menggunakan indikator pengukuran efektivitas dari Budiani (2007). Teori ini menilai bahwa keberhasilan suatu regulasi atau program dapat diukur melalui empat dimensi pokok, yaitu akurasi arah program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, serta monitoring dan pemantauan program. Adapun pembahasan hasil penelitian di lapangan dijabarkan secara mendalam pada subbab-subbab berikut.

3.1 Akurasi Arah Program

Dimensi akurasi arah program berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menentukan sasaran kebijakan secara tepat, yaitu memastikan bahwa program penanganan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menentukan sasaran penerima layanan telah menggunakan pendekatan berbasis data administratif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa data administratif tidak selalu menggambarkan kondisi terbaru di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi secara langsung melalui kegiatan penjangkauan lapangan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi keberadaan anak terlantar seperti jalan raya, persimpangan, dan ruang publik lainnya.

Pelaksanaan penanganan anak terlantar dilakukan melalui beberapa tahapan pelayanan yang sistematis, mulai dari sosialisasi, identifikasi, seleksi, asesmen oleh pekerja sosial, hingga penyusunan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan anak. Setelah proses tersebut, anak diberikan layanan rehabilitasi sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan sementara, konseling psikososial, pembinaan perilaku, serta dukungan pendidikan. Tahap pelayanan kemudian dilanjutkan dengan resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut sebagai upaya memastikan anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya.

Meskipun demikian, pelaksanaan akurasi sasaran masih menghadapi beberapa hambatan, terutama berkaitan dengan keterbatasan dokumen identitas anak dan tingginya mobilitas anak terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan menjadi lebih kompleks karena anak sering berpindah tempat sehingga sulit dipantau secara berkelanjutan. Oleh karena itu, petugas lapangan seperti Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satgas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sasaran program sesuai dengan kondisi faktual masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, penerima manfaat menilai program ini telah memberikan dampak positif karena anak memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, alat tulis, perlengkapan sekolah, serta pembinaan sosial dan psikologis.

3.2 Sosialisasi Program

Dimensi sosialisasi program berkaitan dengan bagaimana pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat, termasuk mekanisme pelayanan dan bentuk intervensi yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui koordinasi dengan perangkat kelurahan, RT/RW, kegiatan penyuluhan masyarakat, serta pemanfaatan media komunikasi digital. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan program dan dapat berpartisipasi dalam proses pelaporan maupun pencegahan kasus penelantaran anak.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara rinci mengenai prosedur memperoleh layanan, bentuk rehabilitasi yang diberikan, serta mekanisme pelaporan anak terlantar. Keterbatasan akses informasi pada kelompok masyarakat tertentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran informasi belum merata. Bahkan dalam beberapa kasus, anak terlantar baru mengetahui adanya layanan pemerintah setelah dilakukan penjangkauan langsung oleh petugas di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi, tetapi juga strategi komunikasi yang mampu menjangkau kelompok rentan secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III (1980) bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila informasi mengenai tujuan dan prosedur pelaksanaan tidak tersampaikan kepada kelompok sasaran.

3.3 Pencapaian Tujuan Program

Dimensi pencapaian tujuan program digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik dalam memberikan perlindungan awal dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pelaksanaan program yang dilakukan melalui shelter memberikan layanan berupa tempat tinggal sementara, makanan, pendidikan, pembinaan perilaku, konseling, serta pendampingan sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana amanat kebijakan daerah.

Akan tetapi, efektivitas program masih menghadapi keterbatasan dalam menyelesaikan akar permasalahan anak terlantar. Permasalahan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, kemiskinan, lemahnya fungsi pengasuhan, dan kondisi lingkungan sosial. Akibatnya, program rehabilitasi yang diberikan masih lebih terlihat efektif dalam jangka pendek, sementara upaya pemberdayaan keluarga dan penguatan ekonomi belum sepenuhnya berjalan optimal.

Dengan demikian, kebijakan penanganan anak terlantar masih memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan perlindungan dan bantuan langsung dibandingkan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan Suharto (2014), intervensi sosial yang efektif tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas individu maupun keluarga agar dapat mengatasi permasalahan sosial secara mandiri.

3.4 Monitoring dan Pemantauan Program

Dimensi monitoring dan pemantauan berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta memastikan keberlanjutan program setelah pelayanan diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan monitoring secara berkala melalui evaluasi internal, laporan bidang, dan pengamatan langsung terhadap perkembangan anak selama berada di shelter. Selama masa rehabilitasi, kondisi anak dapat dipantau dengan cukup baik, terutama dalam aspek perubahan perilaku, kedisiplinan, pendidikan, dan kemampuan berinteraksi sosial.

Namun, kendala terbesar ditemukan pada tahap setelah anak keluar dari shelter atau tahap bimbingan lanjut. Mobilitas anak terlantar yang tinggi menyebabkan pekerja sosial mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Anak yang telah kembali kepada keluarga terkadang kembali menghadapi kondisi sosial yang sama sehingga berpotensi mengalami penelantaran kembali. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada proses pelayanan di dalam shelter, tetapi juga membutuhkan sistem pendampingan pasca rehabilitasi yang kuat.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi monitoring. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pekerja sosial yang tersedia belum sebanding dengan jumlah anak yang membutuhkan layanan, dimana terdapat keterbatasan tenaga pendamping dibandingkan dengan luasnya cakupan permasalahan sosial di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan ke depan membutuhkan penguatan kapasitas SDM, perbaikan fasilitas shelter, serta pengembangan sistem monitoring yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berdasarkan empat dimensi efektivitas Budiani (2007), kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru telah berjalan dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran, terutama pada aspek pelayanan dasar. Namun, efektivitas kebijakan masih belum mencapai tingkat maksimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek sosialisasi, pemberdayaan keluarga, serta keberlanjutan monitoring setelah program selesai.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil analisis lapangan yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penanganan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru memiliki dinamika yang kompleks. Untuk memahami posisi dan kontribusi penelitian ini secara akademik, temuan lapangan perlu dibandingkan secara kritis dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan sosial, rehabilitasi anak terlantar, dan pemberdayaan kelompok rentan. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat faktor penghambat, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta relevansi teori implementasi kebijakan dalam menjelaskan kondisi empiris di lapangan.

Pertama, berkaitan dengan dimensi pencapaian tujuan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada dasarnya telah mampu melaksanakan fungsi utama pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sementara, serta pembinaan anak terlantar melalui fasilitas shelter. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada aspek output pelayanan, kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan formal yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini memperkuat penelitian Rohma dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan dasar bagi anak terlantar melalui mekanisme pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menilai keberhasilan melalui tersedianya layanan dan pelaksanaan program, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial juga sangat ditentukan oleh keberlanjutan intervensi setelah anak menerima pelayanan awal. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep efektivitas kebijakan menurut Dunn (2003) bahwa suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menghasilkan perubahan nyata terhadap masalah yang ingin diselesaikan.

Kedua, terkait dengan aspek sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan anak terlantar masih menghadapi kelemahan pada tahap hulu, yaitu belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pelaporan, pencegahan, dan pengawasan terhadap keberadaan anak terlantar masih rendah. Temuan ini memperkuat penelitian Natika & Rinjani (2022) yang menemukan bahwa komunikasi kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi program sosial.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi pemerintah masih cenderung bersifat satu arah dan belum sepenuhnya membangun hubungan partisipatif dengan masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks membutuhkan dialog, keterlibatan aktif, serta hubungan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, analisis stakeholder menjadi penting untuk memahami peran dan posisi setiap aktor dalam jaringan tata kelola pelayanan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh

Tamrin & Rifti (2023), pemetaan dan pengelolaan stakeholder yang efektif merupakan kunci keberhasilan program pemerintah, karena setiap pemangku kepentingan membawa sumber daya, kepentingan, dan pengaruh yang berbeda dalam mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Dalam konteks penanganan anak terlantar, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran dalam pencegahan dan pengawasan sosial.

Ketiga, mengenai aspek monitoring dan keberlanjutan program rehabilitasi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan jumlah pekerja sosial dibandingkan dengan tingginya mobilitas anak terlantar menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan monitoring pasca terminasi. Akibatnya, proses bimbingan lanjut dan pengawasan terhadap kondisi anak setelah keluar dari shelter belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan intervensi pemerintah lebih banyak berhenti pada tahap penyelamatan sementara dan belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan seperti kemiskinan keluarga, lemahnya fungsi pengasuhan, dan disfungsi sosial.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Muhamad Nur Afandi dkk. (2024) yang menemukan bahwa rehabilitasi sosial anak terlantar menghadapi kendala akibat keterbatasan waktu pelayanan dan belum optimalnya penguatan keluarga. Namun, penelitian ini memberikan perspektif tambahan bahwa masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan durasi pelayanan, tetapi juga keterbatasan sistem monitoring dan kesinambungan program setelah anak kembali ke lingkungan keluarga.

Keempat, terkait dengan perubahan paradigma pelayanan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru masih lebih dominan menggunakan pendekatan karitatif (charity), yaitu memberikan perlindungan dan bantuan dasar dalam jangka pendek. Padahal, penyelesaian masalah anak terlantar membutuhkan pendekatan pemberdayaan (empowerment) yang mampu meningkatkan kapasitas keluarga dan komunitas. Salah satu strategi pemberdayaan yang relevan adalah pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Ndraha & Uang (2018) bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dirancang berdasarkan kekuatan ekonomi lokal terbukti lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Pendekatan serupa perlu diadopsi dalam penanganan anak terlantar, dengan memperkuat kapasitas ekonomi keluarga sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan Suharto (2014) yang menjelaskan bahwa pelayanan sosial yang efektif harus diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok rentan agar mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas Kebijakan Penanganan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru belum mencapai tingkat maksimal (sub-optimal). Keberhasilan pada aspek pelayanan dasar belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pada aspek sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan rehabilitasi. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada analisis yang tidak hanya melihat implementasi kebijakan dari sisi birokrasi pemerintah, tetapi juga mengkaji

hubungan antara pelayanan pemerintah, kapasitas keluarga, dan keterlibatan masyarakat sebagai faktor penting dalam memutus rantai penelantaran anak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan masih adanya hambatan struktural terutama pada aspek sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta penyampaian informasi program kepada masyarakat. Meskipun dimensi akurasi arah program telah berjalan melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar identifikasi sasaran, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dokumen identitas anak serta tingginya mobilitas anak terlantar yang menyebabkan proses pendataan dan pemantauan membutuhkan penjangkauan aktif dari petugas.

Selain itu, program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan anak terlantar melalui layanan shelter. Namun, pelaksanaan program masih lebih dominan pada pendekatan perlindungan sementara dan belum sepenuhnya mengarah pada pemberdayaan berkelanjutan. Oleh karena itu, guna meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan anak terlantar, disarankan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan sosialisasi program, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana shelter, serta memperkuat sistem pendampingan dan monitoring pasca rehabilitasi. Pemerintah daerah juga seyogianya mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, pengelola panti, komunitas masyarakat, dan sektor terkait dalam menyusun program pemberdayaan keluarga berbasis ekonomi sosial agar penanganan anak terlantar tidak berhenti pada bantuan sesaat (charity), tetapi mampu menciptakan kemandirian keluarga dan keberlanjutan pemulihan fungsi sosial anak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu keterbatasan waktu penelitian dan proses pengumpulan data lapangan. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru sebagai studi kasus wilayah perkotaan, sehingga hasil penelitian memerlukan penyesuaian apabila diterapkan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai efektivitas kebijakan penanganan anak terlantar ini masih memiliki ruang pengembangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada cakupan wilayah yang lebih luas, seperti tingkat Provinsi Riau, dengan mengkaji lebih mendalam mengenai integrasi perlindungan sosial lintas sektor, kolaborasi pemerintah dan masyarakat, serta efektivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mencegah munculnya kembali anak terlantar di lingkungan perkotaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si. selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Bapak Drs. Sayuti, MT. selaku Ketua Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Bapak Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta jajarannya (termasuk Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial), Kepala Shelter/UPT di Jalan Tengku Zainal Abidin, serta seluruh anak terlantar dan masyarakat di Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan keterbukaan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya, penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Eka Trisila dan Ibu Fajrina), kakak (Tasya Aldini), adik (Zuhri Alfayyed), serta teman-teman seperjuangan Wisma Sulteng Bawah Petak B yang selalu memberikan doa dan dukungan moral, serta seluruh pihak yang telah tulus membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. N., Sucianti, S. N., & Kristian, I. (2024). Implementasi program rehabilitasi sosial pada anak terlantar di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *15*(1), 136-145. https://doi.org/10.34010/kebijakan.v15i1.7182

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Asa, G. A., Fauk, N. K., Mwanri, L., & Ward, P. R. (2021). Understanding barriers to the access to healthcare and rehabilitation services: A qualitative study with mothers or female caregivers of children with a disability in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(21), 11546. [Terindeks Scopus, Q2] https://doi.org/10.3390/ijerph182111546

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2024). *Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru 2020-2024*. BPS. Diakses dari https://pekanbarukota.bps.go.id

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, *2*(1), 49-57. Tersedia di https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191

Cahyadhi, R., Widjayanti, R., & Permana, A. (2021). Implementasi program kesejahteraan sosial anak terlantar: Kajian aspek psikologis dan motivasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6*(1), 20-34.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru. (2021). *Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) Kota Pekanbaru tahun 2021*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Diakses dari https://dinsos.pekanbaru.go.id

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press. Tersedia di https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=253283

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press. Tersedia di https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=48073

Hadi Khaz, A. F., Wirawan, H., & Prabowo, D. (2023). Perlindungan hak dasar anak terlantar dalam perspektif hukum dan kebijakan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(2), 145-162.

Handayani, M., & Ma'aruf, G. A. A. M. (2019). Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P), 4*(1), 1-11. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/844

Jannah, D. A., Rohma, S., & Pratiwi, R. A. (2022). Peran masyarakat dalam perlindungan anak terlantar melalui mekanisme gotong royong berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 23*(1), 1-18.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS): Anak terlantar*. Kemensos RI. Diakses dari https://dtks.kemensos.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan tahunan perlindungan anak 2022*. KPAI. Diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi

Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. SAGE Publications. Tersedia di https://us.sagepub.com/en-us/nam/social-development/book234095

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. ISBN: 978-1-4522-5787-7. Tersedia di https://eric.ed.gov/?id=ED565763

Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Implementasi program pembinaan anak terlantar: Studi kasus pada Dinas Sosial Kota Dumai. *The World of Public Administration Journal, 5*(2), 78-84. Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/379350287

Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 3*(2), 137-149. https://doi.org/10.33701/j-3p.v3i2.867

Nurwati, N., Fedryansyah, M., & Achmad, W. (2022). Social policy in the protection of street children in Indonesia. *Journal of Governance, 7*(3), 362-371. [Terindeks Scopus] https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16366

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 3.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Details/109940

Rohma, N. N., & kawan-kawan. (2025). Implementasi rehabilitasi sosial untuk anak terlantar di BBPPKS Kota Padang. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 8*(3), 503-513. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.66179

Sajow, R. A., Kumajas, L., & Sambiran, S. (2019). Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Eksekutif, 3*(3), 1-12.

Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (4th ed.). Refika Aditama. ISBN: 978-979-1073-37-5.

Tamrin, H., & Rifti, L. (2023). Analisis stakeholder dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Kabupaten Madiun Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13*(2), 167-177. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3598

UNICEF Indonesia. (2022). *Situasi anak di Indonesia: Tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak*. UNICEF. Diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/situasi-anak-di-indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1) tentang Kewajiban Negara Memelihara Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar. Tersedia di https://www.mkri.id/index.php?page=web.BeritaDetail&id=14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Details/38583/uu-no-11-tahun-2009

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445-488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956